

Pentingnya Etika Publik, Akuntabilitas Publik Dalam Strategi Perencanaan Pengelolaan Kawasan Pelabuhan Penyebrangan

¹Eko Prasetyo

¹ Universitas Jenderal Soedirman, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Magister Administrasi Publik, Indonesia.

ARTICLE INFO

Article history:

Received Jun 9, 2018
Revised Nov 20, 2018
Accepted Jan 11, 2019

Keywords:

Akuntabilitas Publik
Etika Public
Staregi Perencanaan

ABSTRACT

Dalam pengelolaan kawasan pelabuhan penyebrangan, etika publik dan akuntabilitas menjadi elemen krusial dalam strategi perencanaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran etika publik dalam menciptakan transparansi dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan sumber daya. Selain itu, akuntabilitas publik diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan mendukung keputusan yang berorientasi pada kesejahteraan umum. Dengan pendekatan deskriptif-kualitatif, penelitian ini mengeksplorasi praktik-praktik terbaik dalam implementasi etika dan akuntabilitas, serta tantangan yang dihadapi dalam konteks pengelolaan kawasan pelabuhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip etika dan akuntabilitas tidak hanya meningkatkan kinerja pengelolaan, tetapi juga memperkuat legitimasi dan responsivitas pemerintah dalam menghadapi dinamika sosial. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis bagi pengelola kawasan pelabuhan dalam merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan..



Corresponding Author:

Eko Prasetyo,
De Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Magister Administrasi Publik,
Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia.,
Jl. Profesor DR. HR Boenyamin No.708, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Indonesia 53122.
Email: eko.prasetyo008@mhs.unsoed.ac.id

1. INTRODUCTION

Praktik penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia saat ini masih diwarnai oleh berbagai isu dan permasalahan yang mengganggu efektivitas dan kepercayaan masyarakat. Salah satu tantangan utama adalah ketidakjelasan prosedur pelayanan yang tidak tegas mengatur kewajiban penyelenggara dan hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh warga sebagai pengguna layanan. Sebagian besar prosedur cenderung berfokus pada kewajiban warga, sehingga menciptakan ketimpangan dalam interaksi antara penyelenggara dan masyarakat. Selain itu, isu-isu terkait etika dan akuntabilitas publik semakin memperburuk situasi, di mana ketidaktransparanan dan kurangnya integritas dalam pelayanan publik dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Bisri, 2019). Dalam konteks globalisasi yang semakin kompleks, kebutuhan akan etika publik, akuntabilitas, dan budaya kerja yang positif menjadi semakin mendesak. Oleh karena itu, penelitian

ini bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan antara etika publik, akuntabilitas, dan budaya kerja dalam membangun organisasi yang tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga berkembang secara berkelanjutan, serta menciptakan kepercayaan yang lebih besar dari masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

Menurut Peter Singer, seorang filsuf dan ahli etika terkemuka, etika dapat dipahami sebagai studi tentang apa yang seharusnya kita lakukan dan bagaimana kita seharusnya hidup. Ia menekankan pentingnya mempertimbangkan dampak tindakan kita terhadap orang lain dan makhluk hidup lain, serta bagaimana prinsip-prinsip moral dapat diterapkan dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Etika mencakup perbuatan yang boleh atau tidak boleh dilakukan oleh seseorang.

Menurut R. K. M. B. A. Alavi, akuntabilitas publik adalah proses di mana pemerintah dan lembaga publik menjelaskan, mempertanggungjawabkan, dan menjawab atas tindakan mereka kepada masyarakat, termasuk dalam hal penggunaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan. Dalam pandangannya, akuntabilitas publik mencakup aspek transparansi, partisipasi masyarakat, dan mekanisme pengawasan yang memastikan bahwa setiap keputusan dan tindakan yang diambil oleh penyelenggara negara dapat dipertanggungjawabkan dan diawasi oleh publik.

Perencanaan merupakan salah satu fungsi manajerial yang sangat penting dalam mencapai tujuan organisasi. Strategi perencanaan tidak hanya melibatkan penentuan tujuan. Menurut Henry Mintzberg, seorang tokoh manajemen, mengemukakan bahwa perencanaan tidak selalu bersifat linier dan formal. Ia berargumen bahwa perencanaan sebaiknya bersifat adaptif, mengizinkan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. Menurutnya, strategi sering kali muncul dari praktik sehari-hari (*emergent strategy*) daripada hanya dari perencanaan formal. Strategi perencanaan adalah proses yang kompleks dan multidimensional yang melibatkan berbagai pendekatan dan pemikiran dari para ahli. Dari pendekatan adaptif Mintzberg setiap perspektif menawarkan wawasan yang berharga bagi organisasi dalam merumuskan strategi yang efektif dengan memahami pandangan ini, organisasi dapat lebih siap untuk menghadapi tantangan dan mencapai tujuan mereka dengan lebih efisien.

Beberapa isu ini sering kali berkaitan dan dapat berdampak signifikan pada kinerja organisasi secara keseluruhan yang berkembang saat ini Pelanggaran Etika, Konflik kepentingan, Transparansi, Pertanggungjawaban yang lemah, kurangnya mekanisme pengawasan yang lemah, dan kurangnya kolaborasi. Karena itu, pembahasan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik, dengan membahas isu-isu etika dan akuntabilitas publik, serta strategi perencanaan supaya public/masyarakat dapat lebih memahami pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai etika, akuntabilitas dan strategi perencanaan dalam kehidupan bermasyarakat. Masyarakat dapat mendorong para pejabat publik untuk melakukan tindakan yang lebih baik dan menghindari praktik yang merugikan masyarakat. Tujuan akhir pada etika, akuntabilitas dan strategi perencanaan sebagai harapan untuk mengurangi praktik korupsi, karena dengan membahas isu tersebut maka masyarakat dapat menuntut para pejabat publik untuk menghindari praktik korupsi dan tindakan yang merugikan masyarakat. Metode penelitian pada artikel kali ini yaitu menggunakan teknik deskriptif kualitatif melalui studi literatur dengan beberapa sumber rujukan yang kredibel, untuk mengetahui sejauh mana isu-isu terkait etika, akuntabilitas publik dan strategi perencanaan di Indonesia mengenai pelayanan yang diberikan oleh para pelayan publik terhadap masyarakat.

2. RESEARCH METHOD (10 PT)

Beberapa isu ini sering kali berkaitan dan dapat berdampak signifikan pada kinerja organisasi secara keseluruhan yang berkembang saat ini Pelanggaran Etika, Konflik kepentingan, Transparansi, Pertanggungjawaban yang lemah, kurangnya mekanisme pengawasan yang lemah, dan kurangnya kolaborasi. Karena itu, pembahasan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik, dengan membahas isu-isu etika dan akuntabilitas publik, serta strategi perencanaan supaya public/masyarakat dapat lebih memahami pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai etika, akuntabilitas dan strategi perencanaan dalam kehidupan bermasyarakat. Masyarakat dapat mendorong para pejabat publik untuk melakukan tindakan yang lebih baik dan menghindari praktik yang merugikan masyarakat. Tujuan akhir pada etika, akuntabilitas dan strategi perencanaan sebagai harapan untuk mengurangi praktik korupsi, karena dengan membahas isu tersebut maka masyarakat dapat menuntut para pejabat publik untuk menghindari praktik korupsi dan tindakan yang merugikan

masyarakat. Metode penelitian pada artikel kali ini yaitu menggunakan teknik deskriptif kualitatif melalui studi literatur dengan beberapa sumber rujukan yang kredibel, untuk mengetahui sejauh mana isu-isu terkait etika, akuntabilitas publik dan strategi perencanaan di Indonesia mengenai pelayanan yang diberikan oleh para pelayan publik terhadap masyarakat. Pengumpulan data, yang dilakukan dengan mengakses sumber-sumber literatur yang difokuskan pada topik kajian, seperti buku, jurnal, artikel, Literatur yang digunakan berasal dari berbagai sumber yang dapat diandalkan. Pemilihan Data yang relevan dan terkait dengan topik penelitian. Analisis Data, yaitu membaca, memahami, dan menilai data yang telah dikumpulkan. Penyajian Data disajikan secara terstruktur dan metodis dalam penyajian data yang telah disusun dan disajikan dalam bentuk tabel, grafik atau diagram. Berdasarkan temuan analisis data yang telah dilakukan, dibuat penilaian dan rekomendasi. Temuan dan rekomendasi tersebut dibuat dalam narasi yang jelas dan rapi. Metode ini umum digunakan dalam penelitian kajian literatur karena dapat memberikan gambaran yang lengkap dan detail mengenai faktor penghambat dan pendorong dalam penerapan etika, akuntabilitas publik dan strategi perencanaan.

3. RESULTS AND DISCUSSIONS

Pentingnya Etika Publik dalam Pengelolaan Kawasan Pelabuhan, memainkan peran penting dalam membangun transparansi dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan kawasan pelabuhan penyebrangan Pengelola yang menerapkan prinsip etika dalam keputusan dan tindakan mereka akan lebih dihargai oleh masyarakat. Etika publik juga berfungsi sebagai landasan untuk menghindari praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang, yang sering kali menghambat pengelolaan sumber daya yang efektif dengan menciptakan lingkungan yang beretika, pelabuhan dapat menarik lebih banyak investasi dan mendukung pengembangan ekonomi lokal.

Akuntabilitas publik menjadi kunci dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan Keputusan dengan adanya akuntabilitas, masyarakat dapat mengetahui bagaimana kebijakan diambil dan bagaimana anggaran digunakan. Hal ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan kritik, sehingga keputusan yang diambil lebih sesuai dengan kebutuhan dan harapan mereka. Akuntabilitas juga meningkatkan legitimasi pengelola dalam menjalankan tugas mereka, karena masyarakat merasa memiliki suara dalam pengelolaan kawasan Pelabuhan.

Tantangan dalam implementasi etika dan akuntabilitas pengelolaan kawasan pelabuhan di antaranya adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang nilai-nilai etika di kalangan pengelola dan Masyarakat, hal ini dapat dilakukan dengan membentuk tim khusus yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil mempertimbangkan prinsip etika dan akuntabilitas. Penerapan etika publik dan akuntabilitas publik dalam strategi perencanaan pengelolaan kawasan pelabuhan penyebrangan sangat penting untuk menciptakan sistem yang transparan, responsif, dan inklusif. Meskipun terdapat tantangan dalam implementasinya, dengan komitmen dan upaya yang tepat, pengelola dapat menciptakan lingkungan yang mendukung keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

Sejarah Etika

Etika sebagai disiplin ilmu memiliki akar yang dalam tradisi filosofis, dimulai sejak zaman kuno, Filsuf Yunani seperti Socrates (470–399 SM) mengajukan pertanyaan mendasar tentang apa itu kebaikan dan bagaimana manusia seharusnya hidup. Plato (427–347 SM) menekankan pentingnya ide-ide atau bentuk-bentuk ideal, sedangkan Aristoteles (384–322 SM) memperkenalkan konsep etika kebajikan, yang menekankan pengembangan karakter dan kebajikan sebagai inti dari kehidupan yang baik (Aristotle, *Nicomachean Ethics*). Pada abad pertengahan, pemikir seperti Thomas Aquinas (1225–1274) menggabungkan filsafat Aristotelian dengan ajaran Kristen, memperkenalkan konsep hukum alam, moralitas yang berakar pada kodrat manusia (Aquinas, *Summa Theologica*) dan ada abad ke-18, Kant (1724–1804) mengembangkan etika deontologis, menekankan bahwa tindakan harus dinilai berdasarkan prinsip moral yang universal dan kewajiban moral (Kant, *Groundwork of the Metaphysics of Morals*). Dan Pada abad ke-20 dan 21, etika telah berkembang dengan pendekatan postmodern yang mempertanyakan norma dan nilai-nilai tradisional, serta mendorong perspektif yang lebih inklusif dan pluralis (Bauman, *Postmodern Ethics*) dalam posisi etika di bidang

administrasi publik memiliki peranan yang besar saat ini, walaupun pada awalnya teori klasik yang diprakarsai oleh para ahli teori klasik administrasi publik antara lain Weber, Wilson, Gulick, dan Urwick yang kurang memberi ruang pada pilihan-pilihan etika atau moral.

Periode I, yakni Dikotomi Politik/Administrasi, telah menandai periode dari 1900-1926 dan administrasi merupakan disiplin ilmu yang baru. Dimulai dengan tulisan Frank J. Goodnow yakni *Politics and Administration* (1900) dan mencapai puncaknya dalam karya Leonard D. White yakni *Introduction to the Study of Public Administration* (1926). Dorongan utama dari paradigma ini adalah perbedaan administrasi dari politik. Sejalan dengan upaya di atas, White (1926) menerima dikotomi politik/administrasi dan menggunakan istilah "manajemen" sebagai cakupan khusus studi administrasi publik. Meskipun pemikiran White lebih berdasar pada ide Wilson dan Goodnow, ia juga menekankan aspek seperti rekrutmen pegawai, penilaian, klasifikasi, promosi, disiplin, dan pemberhentian. Menurut White, model bisnis merupakan model yang baik untuk diterapkan pada pemerintah. Periode II yakni Prinsip-prinsip Administrasi telah menandai periode dari 1927-1937. Fokus utama dari administrasi publik adalah mencari dan mengartikulasikan prinsip-prinsip dasar administrasi yang dapat dipandang sebagai prinsip yang universal. W.F. Willoughby dengan tulisannya yakni *"Principles of Public Administration"* (1927) merupakan buku teks pertama yang mengartikulasikan prinsip-prinsip administrasi publik, kemudian mencapai puncaknya pada tulisan Luther Gulick dan Lyndall Urwick prinsip-prinsip administrasi publik, human organization merupakan fokus utama paradigma ini, politik yang *irrespective*, kelembagaan, atau sistem nilai. Periode dari 1937 hingga 1950 merupakan tantangan bagi prinsip-prinsip administrasi. Herbert Simon, melalui bukunya *Administrative Behaviour* (1947), menawarkan suatu paradigma baru yang berfokus pada konsep pembuatan keputusan, dengan pemisahan aspek-aspek faktual dan normatif dari administrasi publik.

Karena kebutuhan moral dari seorang administrator hanyalah sebatas keharusan untuk menjalankan tugas sehari-hari secara efisien, begitulah siklus seorang administrator. Perkembangan pemerintahan berbasis etika, di sisi lain tidak dapat dipisahkan dari etika yang telah ada di masyarakat sebagai sistem nilai yang dipengaruhi oleh norma, aturan, konvensi, dan budaya. Sistem nilai tersebut memiliki efek di bidang lain, mewarnai sikap dan tindakan yang kemudian dapat diartikan sebagai moral atau immoral. Praduga ini, yang didasarkan pada nalar atau logika dan digunakan untuk menyembunyikan makna etis, menghubungkan perilaku baik dan buruk.

Sejarah Akuntabilitas Publik

Konsep akuntabilitas dapat ditelusuri kembali ke zaman kuno, di mana penguasa dan pejabat publik bertanggung jawab kepada rakyat. Misalnya, dalam masyarakat Mesir kuno, pejabat pemerintah diharuskan mempertanggungjawabkan tindakan mereka kepada raja dan dewan penasihat. Selama abad pertengahan, perkembangan akuntabilitas mulai terpengaruh oleh konsep moralitas dan agama. Di Eropa, Gereja memainkan peran penting dalam mengawasi tindakan pejabat publik pentingnya integritas dan moralitas dalam pemerintahan. Pada era Modern dengan munculnya negara - bangsa pada abad ke-17 dan 18, akuntabilitas publik mulai diartikulasikan dalam konteks pemerintahan yang lebih sistematis. Konsep pemisahan kekuasaan oleh Montesquieu (1689–1755) berkontribusi pada pentingnya mekanisme pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Pada era globalisasi dan informasi saat ini, akuntabilitas publik semakin penting. Penulis seperti Mark Bovens (2007) dalam artikelnya *"Analyzing and Assessing Public Accountability"* menggambarkan berbagai bentuk akuntabilitas, termasuk akuntabilitas vertikal (kepada warga) dan horizontal (antar lembaga), serta tantangan yang dihadapi dalam konteks digital. Akuntabilitas adalah media periodik yang digunakan untuk meminta pertanggungjawaban orang-orang atas pencapaian atau kegagalan misi organisasi yang berkaitan dengan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 2004).

Akuntabilitas pun menunjukkan bagaimana komitmen pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tercermin dalam tingkat akuntabilitasnya. Dalam konteks hukum, masyarakat dan nilai-nilai bersama, pemerintah harus meningkatkan akuntabilitasnya terhadap kepentingan publik (Henry, 2007). akuntabilitas dikembangkan dengan pemikiran para ahli hingga melahirkan peran-peran yang harus dijalankan dari apa yang diperlakukan. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan pun pada akhirnya akuntabilitas sering dipergunakan atau diperuntukkan bagi pekerja ataupun aparatur sipil negara “civil servant” yang harus mempertanggungjawabkan kepada masyarakat atau publik dan kepada atasan maupun kepada yang setingkatnya. Oleh karena itu, akuntabilitas kini tidak jauh dari kata akuntabilitas public yang mana berorientasi kepada publik atau masyarakat.

Sejarah Strategi perencanaan

Era Awal Strategi perencanaan memiliki akar yang mendalam bagi sejarah manusia. Sejak zaman prabudaya, manusia telah merencanakan aktivitas berburu dan bertani untuk memastikan kelangsungan hidup. Dalam konteks militer, strategi digunakan untuk merencanakan peperangan dan penguasaan wilayah. Contohnya, Sun Tzu dalam bukunya *The Art of War* (abad ke-5 SM) membahas pentingnya strategi dan perencanaan dalam konteks militer, pada era digital dan globalisasi sekarang revolusi teknologi informasi dan globalisasi telah membawa tantangan baru dalam perencanaan strategis. Organisasi kini harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti perubahan cepat dalam teknologi, pasar global, dan kebutuhan konsumen yang beragam. Perencanaan strategis modern sering kali melibatkan analisis big data dan penggunaan alat-alat analitis untuk membuat keputusan yang lebih tepat. Sejarah strategi perencanaan menunjukkan evolusi pemikiran dan praktik manajemen dari pendekatan sederhana hingga metode yang lebih kompleks dan adaptif. Dengan semakin dinamisnya lingkungan bisnis, penting bagi organisasi untuk terus mengembangkan dan menyesuaikan strategi perencanaan mereka agar tetap relevan dan kompetitif.

Tujuan Akuntabilitas

Akuntabilitas bertujuan untuk mengurangi berbagai patologi dalam sektor publik dan mempromosikan objektivitas dalam perubahan. Akuntabilitas memiliki indikator sebagai berikut (Hulme & Turner, 1997) legitimasi para pembuat kebijakan, menyangkut aspek legal atau formal yang menjadi dasar kewenangan pemerintah atau pihak tertentu dalam menjalankan praktik organisasi, keberadaan moral yang memadai, kualitas moral dari para penyelenggara pemerintah sangat penting agar tidak terjadi diskriminasi dan penyelewengan dalam organisasi, kepekaan, menunjukkan sikap pemerintah yang terbuka terhadap saran dan kritik dari masyarakat yang mana dapat bermanfaat bagi kualitas pemerintah di masa depan, keterbukaan, pemerintah perlu menyediakan pelayanan informasi publik yang dapat diakses segala pihak termasuk masyarakat agar dapat menjamin bahwa aparatur pemerintah bertindak sesuai aturan yang berlaku, pemanfaatan sumber daya secara optimal, mendayagunakan seluruh kemampuan aparat, budget atau anggaran dan prasarana yang tersedia guna mendukung pelayanan masyarakat; dan upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas, berusaha untuk mencapai hasil objektif dalam tiap kinerja pemerintah, karena kinerja pemerintah harus didasarkan pada standar yang jelas dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Strategi perencanaan

Strategi perencanaan merupakan konsep yang berkembang dalam manajemen dan organisasi, dan melibatkan pengembangan rencana yang sistematis untuk mencapai tujuan tertentu, berbagai pandangan dan teori yang lebih mendalam tentang strategi perencanaan. Menurut Mintzberg (1994), strategi perencanaan dapat didefinisikan sebagai serangkaian langkah yang terorganisir untuk mencapai visi dan misi organisasi. Dalam buku *The Rise and Fall of Strategic Planning*, Mintzberg menekankan bahwa perencanaan tidak selalu bersifat linier dan formal, melainkan harus adaptif terhadap perubahan lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa strategi sering kali muncul dari praktik

sehari-hari (emergent strategy), bukan hanya dari proses perencanaan formal. Ansoff (1988) mengembangkan model yang dikenal sebagai Matriks Ansoff, yang menggambarkan hubungan antara produk dan pasar, model ini membantu organisasi dalam merumuskan strategi pertumbuhan, baik melalui penetrasi pasar, pengembangan produk, pengembangan pasar, atau diversifikasi. Menurut Ansoff, perencanaan yang sistematis sangat penting untuk meminimalkan risiko dalam pengambilan keputusan strategis. Pentingnya fleksibilitas dalam perencanaan juga dibahas oleh Kaplan dan Norton (1996) melalui konsep Balanced Scorecard.

Mereka berargumen bahwa organisasi harus mengukur kinerja tidak hanya berdasarkan keuangan, tetapi juga pada faktor-faktor lain seperti pelanggan, proses internal, dan pembelajaran. Dengan pendekatan ini, organisasi dapat menyesuaikan strategi mereka berdasarkan umpan balik yang diterima. Strategi perencanaan adalah proses yang kompleks dan dinamis. Dari pandangan Mintzberg tentang adaptivitas hingga pentingnya teknologi dalam pengambilan keputusan, perencanaan strategis memerlukan pemahaman yang mendalam tentang lingkungan internal dan eksternal. Dengan demikian, organisasi harus terus menerus mengevaluasi dan menyesuaikan strategi perencanaan mereka agar tetap relevan dan kompetitif di pasar.

4. CONCLUSION

Dalam pengelolaan kawasan pelabuhan penyebrangan, penerapan etika publik dan akuntabilitas publik sangatlah penting untuk menciptakan sistem manajemen yang efektif, transparan, dan berkelanjutan. Penerapan etika publik berperan krusial dalam membangun kepercayaan masyarakat dengan melaksanakan prinsip-prinsip etika, pengelola dapat menghindari praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang, sehingga menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi dan pengembangan ekonomi lokal. Akuntabilitas mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, memberikan suara kepada mereka, serta meningkatkan legitimasi pengelola. Dengan meningkatkan transparansi mengenai penggunaan anggaran dan kebijakan, masyarakat akan lebih terlibat dan merasa memiliki andil dalam pengelolaan kawasan. meskipun terdapat tantangan dalam penerapan etika dan akuntabilitas, seperti kurangnya kesadaran dan tekanan politik, pendidikan dan pelatihan berkelanjutan sangat diperlukan. Membentuk tim khusus untuk memastikan setiap kebijakan yang diambil mempertimbangkan aspek etika dan melibatkan masyarakat secara aktif. Dengan demikian, integrasi etika publik dan akuntabilitas dalam strategi perencanaan pengelolaan kawasan pelabuhan bukan hanya meningkatkan kinerja manajerial, tetapi juga memperkuat legitimasi dan responsivitas pemerintah terhadap dinamika sosial yang ada. Keberhasilan implementasi prinsip-prinsip ini akan berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan pengelolaan kawasan pelabuhan.

REFERENCES

- Bisri, M. (2019). Judul Buku atau Artikel. Penerbit.
- Singer, P. (1993). *Practical Ethics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Alavi, R. K. M. B. A. (2015). Dalam artikel berjudul "Accountability in Public Sector Organizations: Concepts and Practices," yang dipublikasikan di *International Journal of Public Sector Management*.
- Mintzberg, H. (1973). *The Nature of Managerial Work*. New York: Harper & Row.
- Hulme, M., & Turner, S. (1997). *The Geography of Climate Change: Impacts and Adaptation*. London: Routledge.
- Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (1996). *The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action*. Boston: Harvard Business Review Press.
- Goodnow, F. J. (1900). *Politics and Administration*. New York: Columbia University Press.
- White, L. D. (1926). *Introduction to the Study of Public Administration*. New York: Macmillan.
- Willoughby, W. F. (1927). *Principles of Public Administration*. New York: Harper & Brothers.
- Marx, M. (1946). *Proses Administrasi sebagai Suatu Fase dari Peradaban Modern*. Jakarta: [Nama Penerbit].
- Kumrotomo, W. (2015). *Etika Administrasi Negara*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
- Solomon, R. C. (1987). *Etika: Suatu Pengantar*. Jakarta.
- Gie, T. L. (2006). *Etika Administrasi Pemerintahan*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Wicaksono, K. W. (2015). *Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik*. Kristian Widya Wicaksono, 3-12.

Yusuf, I. M. (2018). Etika Dalam Wujud Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan. Jurnal UNIGAL, 548-557.